

## **BAB 2 GAMBARAN UMUM**

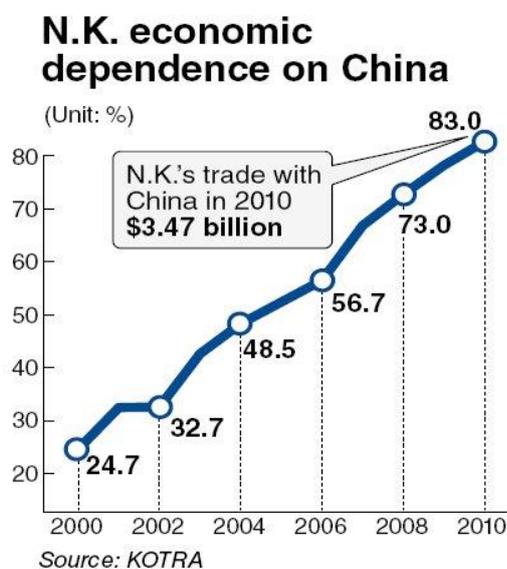
Di dalam suatu perubahan tentu saja terdapat masa lalu di dalamnya. Masa lalu tersebut bisa saja berbeda dengan masa saat ini. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar dalam politik luar negeri suatu negara. Sehingga, pada bab ini akan membahas sejarah perkembangan nuklir Korea Utara dan sikap Tiongkok pada masa itu. Topik pada bab ini penting untuk bahas dalam memahami perubahan sikap politik luar negeri Tiongkok kepada Korea Utara dalam isu proliferasi nuklir dan untuk melihat sikap – sikap Tiongkok yang di tunjukan pada saat itu.

Pada bab ini akan disusun seperti berikut, latar belakang pembangunan nuklir Korea Utara, respons pemerintah Tiongkok dalam pembangunan nuklir Korea Utara hingga terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok terkait isu ini dan juga kesimpulan pada bab ini. Bab ini dapat dikatakan juga sebagai gambaran umum dari fenomena yang terjadi dalam penelitian ini.

### **2.1. Latar Belakang Pembangunan Nuklir Korea Utara**

Perang dingin merupakan titik awal dalam perkembangan senjata nuklir Korea Utara. Pada masa ini juga semenanjung Korea diselimuti oleh dua kubu besar yakni Korea Utara disekutui oleh Tiongkok dan Uni Soviet dan Korea Selatan disekutui oleh Amerika Serikat. Hubungan di antara negara tersebut dilandasi oleh aliansi ideologi komunisme dan liberalisme (Wu, 2001, hal. 276). Presiden Tiongkok pada masa itu Liu Shaoqi menyatakan bahwa politik luar negeri Tiongkok mengedepankan hubungan di antara sekutunya yakni Korea Utara dan Uni Soviet dalam perkembangan dunia dan melawan kolonialisme barat (Lanteigne, 2009, hal. 92).

Hubungan di antara kedua negara tersebut juga diperkuat dengan adanya perjanjian aliansi yang di sepakati oleh kedua negara tersebut yakni *The Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance* pada tahun 1961. Dengan perjanjian tersebut kedua negara mengharuskan untuk saling melindungi satu sama lain dari ancaman luar (Wen dan Shepherd, 2017). Hal tersebut di implementasikan oleh Tiongkok dengan mengirim pasukan militernya ke Korea Utara ketika Amerika Serikat mengirimkan pasukan militernya ke Korea Selatan pada masa konflik semenanjung Korea (Scobell, 2004, hal. 2-4). Posisi penting Tiongkok dalam hubungan luar negerinya dengan Korea Utara juga dapat dilihat melalui kerja sama ekonomi di antara kedua negara tersebut.



**Gambar 2.1** Grafik Kerjasama Ekonomi Korea Utara Dengan Tiongkok

Sumber: (KOTRA, 2011)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *N.K.'s economic dependence on China expected to deepen.* (2011). Dalam Korean Herald News: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20111223000339&mod=skb>. Diunduh pada 23 Desember 2018.

Dari grafik ini dapat diketahui bahwa setiap tahunnya kerja sama ekonomi Tiongkok dengan Korea Utara semakin meningkat. Kerja sama ekonomi tersebut juga telah menyebabkan ketergantungan kebutuhan ekonomi Korea Utara terhadap Tiongkok kurang lebih sebesar \$3.47 miliar USD.<sup>2</sup> Hal ini semakin memberikan gambaran bahwasanya Tiongkok memiliki posisi penting dalam hubungan luar negeri Korea Utara. Dalam artian pengaruh kedudukan Tiongkok dalam kebijakan luar negeri Korea Utara tidak dapat dinafikan.

Ketergantungan ekonomi Korea Utara terhadap Tiongkok ini juga memiliki keterkaitan dengan motif pembangunan senjata nuklir Korea Utara. Hal ini ter-cerminkan ke dalam gagasan doktrin nasional Korea Utara yang di gagas oleh Kim Il Sung di kenal sebagai doktrin *Juche* (kemandirian). Gagasan doktrin *Juche* ini berfokus kan kepada kemandirian negara dalam tiga bidang utama yaitu politik, ekonomi dan militer (Kang, 2003, hal. 60).<sup>3</sup> Hal tersebut diungkapkan oleh Kim Il Sung dalam pidato kepresidenannya yang menyatakan, “*Let Us Defend the Revolutionary Spirit of Independence, Self-Reliance, and Self-Defense More Thoroughly in All Fields of State Activities*” (Kim S. C., 2006, hal. 30-32). Doktrin *Juche* ini dapat di interpretasikan sebagai “*a general world view that sets the parameters, the outer boundaries of engagement with outside world*”.<sup>4</sup> Pandangan Korea Utara terhadap komunitas internasional bahwasanya negaranya harus

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Kang, C. E. (2003). *North Korea's Engagement Motives*. Dalam S.-H. J. Tae-Hwan Kwak, *The Korean Peace Process and the Four Powers*. London: Routledge.

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 46

menjadi negara yang “mandiri” inilah yang melatarbelakangi adanya pembangunan senjata nuklir tersebut. Dalam artian pembangunan senjata nuklir ini digunakan oleh Korea Utara sebagai *bargaining position* atau daya tawarnya di dalam komunitas internasional untuk mengurangi ketergantungan kondisi negaranya terhadap negara lain sekaligus menjadi alat perlindungan diri dari ancaman luar (Solingen, 2007, hal. 138-139).

## **2.2. Awal Mula Pembangunan Nuklir Korea Utara**

### **2.2.1. Perang Dingin 1965 – 1991**

Perkembangan teknologi nuklir Korea Utara bermula tepatnya pada tahun 1965, ketika Korea Utara mendirikan Akademi Militer Hamyong. Di dalam akademi tersebut pasukan militer Korea Utara mulai menerima pelatihan untuk mengembangkan rudal. Di saat itu juga Korea Utara membangun pusat penelitian nuklir Yongbyong di Pyongyang. Dengan adanya pembangunan ini, Korea Utara berhasil menemukan bahan utama dari pembuatan senjata nuklirnya yakni plutonium. Seiring berjalannya waktu juga, Korea Utara mulai menguasai teknologi nuklir dengan melakukan uji coba penggunaan nuklir sebagai energi terbarukan yang berkekuatan sekitar 5MW (Bermudez, 1999, hal. 4).<sup>5</sup> Daya tersebut dapat dikatakan kecil untuk membangun sebuah rudal nuklir bagi Korea Utara. Walaupun daya yang dimiliki oleh Korea Utara masih terbilang kecil, Kim Il Sung pemimpin Korea Utara pada masa itu tidak menyerah begitu saja. Kim Il Sung justru

---

<sup>5</sup> Bermudez, J. S. (1999). *A History of Ballistic Missile Development in the DPRK*. Monterey Institute Of International Studies, 1-38.

menjadikan hal tersebut sebagai sebuah kesempatan besar untuk mengembangkan teknologi nuklirnya. Sehingga, Kim Il Sung memutuskan untuk menjadikan pembangunan teknologi nuklir sebagai prioritas nasional utamanya pada masa itu<sup>6</sup>.

Pada tahun 1982 melalui pantauan satelit Amerika Serikat, diketahui terdapat pengembangan fasilitas nuklir secara masif yang dilakukan oleh Korea Utara. Diperkirakan pada masa itu Korea Utara sudah dapat mengembangkan teknologi nuklirnya sekitar 50 – 200MW yang akan digunakan sebagai rudal militernya (Carrel Billiard dan Wing, 2010, hal. 29)<sup>7</sup>. Sebelumnya, International Atomic Energy Agency (IAEA) pun melaporkan kepada DK-PBB bahwa Korea Utara telah melakukan pembangunan teknologi nuklir secara masif dan meminta untuk diadakannya pengawasan terhadap hal tersebut (Guoliang, 2005, hal. 36). Hal ini menjadi salah satu latar belakang terciptanya perjanjian internasional yang mengatur tentang pembangunan teknologi nuklir di dunia yang dinamakan *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) pada tahun 1968 dan akan mulai dilaksanakan secara efektif pada tahun 1970 (UN, 1995).

Korea Utara pun merespons kecurigaan Amerika dan IAEA dengan menyatakan pengembangan nuklir tersebut merupakan salah satu pembangunan negaranya dalam menunjang (Heo dan Jung-Yeop, 2008, hal. 491). Hal ini dibuktikan oleh Korea Utara dengan menyepakati perjanjian NPT pada tahun 1983.<sup>8</sup> Dalam artian Korea Utara menyepakati bahwasanya pembangunan

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 8

<sup>7</sup> Carrel Billiard, F. dan Wing, C. (2010). *North Korea and the NPT*. International Peace Institute,

<sup>8</sup> *Ibid.* hal. 30-31

teknologi nuklir hanya digunakan untuk fasilitas masyarakat sipil bukan digunakan sebagai senjata militer negaranya. Walaupun demikian, kecurigaan Amerika Serikat terhadap perkembangan nuklir Korea Utara berujung pada pembangunan *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) pada 1987 di negara sekutunya Korea Selatan yang digunakan untuk menembak jatuh rudal di area regional tersebut (Meick dan Salidzanova, 2017, hal. 3-4)<sup>9</sup>. Hal ini menyebabkan ketegangan di antara negara – negara tersebut semakin meningkat. Dalam artian Korea Utara menafsirkan pembangunan THAAD merupakan ancaman bagi negaranya. Sedangkan, pembangunan teknologi nuklir Korea Utara merupakan ancaman bagi Amerika Serikat dan negara sekutunya<sup>10</sup>.

Keberpihakan Tiongkok kepada Korea Utara pada masa ini dapat dilihat dari penolakan yang dilakukan oleh Tiongkok untuk menyepakati perjanjian NPT yang telah ditetapkan. Hal ini didasari bahwa Tiongkok memandang pengembangan nuklir merupakan suatu kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alamnya (Guoguang, 2008, hal. 58). Dalam artian pengembangan nuklir Korea Utara merupakan hak yang dimiliki negara tersebut. Keberpihakan Tiongkok terhadap Korea Utara semakin kontras dalam isu pembangunan THAAD di Korea Selatan. Tiongkok memandang pembangunan THAAD sebagai dalih pembenaran untuk melindungi diri Amerika Serikat dan Korea Selatan yang sebenarnya digunakan untuk menghegemoni dunia. Hal tersebut di jelaskan oleh Samuel Kim

---

<sup>9</sup> Meick, E., dan Salidzanova, N. (2017). *China's Response to U.S.-South Korean Missile Defense System Deployment and its Implications*. U.S China Economic and Security Review Commission,

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 8-10

(1994) yang menyatakan “*the collapse of transnational communism at its epicenter, international sanctions, especially U.S.-sponsored sanctions against a socialist regime, trigger the sound and furious response of state sovereignty*” (Kim, 1994, hal. 30).<sup>11</sup> Dalam artian Tiongkok memandang bahwa Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi konflik yang terjadi di dalam negerinya saja melainkan Amerika Serikat juga mulai mendominasi dunia melalui kebijakan – kebijakan dalam instansi internasional seperti *International Monetary Fund (IMF)*, *World Trade Organization (WTO)*, *United Nation* atau PBB (UN) dan juga Bank Dunia termasuk usulan sanksi dalam forum DK-PBB.<sup>12</sup>

### **2.2.2. Pasca Perang Dingin 1998 – 2001**

Konflik perang dingin di wilayah semenanjung Korea pun berakhir pada tahun 1991 dengan adanya perjanjian *Treaty of Reconciliation and Non-aggression* yang berisikan mengenai gencatan senjata di antara Seoul dan Pyongyang serta komitmen kedua negara tersebut untuk saling bekerja sama dalam bidang keamanan (UN, 1992). Lalu, seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa Korea Utara telah menyetujui perjanjian NPT mengenai pembangunan nuklir di negaranya. Walaupun demikian, kecurigaan komunitas internasional terhadap Korea Utara pun tidak kunjung usai.

---

<sup>11</sup> Kim, S. S. (1994). *The Dialectics of China's North Korean Policy in a Changing Post-Cold War World*. Asian Perspective,

<sup>12</sup> *Ibid.*

Kecurigaan ini pun dipicu dari perbedaan temuan IAEA dengan pernyataan pemerintah Korea Utara. Di dalam laporan IAEA menyebutkan bahwa pemerintah Korea Utara hanya mengklaim bahwa negaranya baru dapat menciptakan plutonium sebesar 90g per-tahun dan digunakan untuk fasilitas masyarakat sipil, sedangkan pantauan satelit IAEA menunjukkan bahwa Korea Utara pada tahun 1995 telah berhasil menciptakan 50 – 200MW yang diperkirakan dapat menciptakan sekitar 40-50kg plutonium per tahun (IAEA, 1997). Perbedaan penemuan ini dianggap IAEA sebagai ketidakpatuhan Korea Utara dalam perjanjian NPT yang telah disepakatinya.

Sehingga pada masa itu IAEA menganjurkan kepada DK-PBB untuk memberikan Sanksi Ekonomi kepada Korea Utara dan Amerika pun mendesak Tiongkok untuk berperan aktif dalam isu ini mengingat Tiongkok memiliki hubungan dekat dengan Korea Utara dengan harapan melalui peran aktif Tiongkok ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap isu tersebut (Jeong, 2012, hal. 30). Namun, Tiongkok pun menunjukkan keberpihakannya terhadap Korea Utara dengan membantah hubungan kedekatan di antara kedua negara tersebut. Hal ini terlihat dari pidato Qian Qichen dalam kunjungannya ke Korea Utara bahwa Tiongkok tidak memiliki wewenang untuk menghentikan pengembangan nuklir tersebut walaupun Pyongyang memiliki hubungan yang dekat dengan negaranya (Questia News, 1993).

Alih – alih ancaman sanksi DK-PBB terhadap Korea Utara, justru Tiongkok memperlihatkan keberpihakannya dengan peningkatan hubungan kerja sama ekonomi di antara kedua negara tersebut. Diperkirakan setelah kunjungan

Menteri Luar Negeri Qian Qichen ke Korea Utara, produksi ekspor – impor di antara kedua negara pun meningkat sekitar 25% - 30% hingga di tahun akhir 2001 aktivitas ekspor – impor keduanya meningkat sebesar 51.6% (Snyder, 2009, hal. 223)<sup>13</sup>. Dalam artian Tiongkok memberikan penolakan terhadap pengajuan sanksi yang disarankan oleh IAEA kepada DK-PBB (New York Times, 1993). Tidak hanya itu, pada masa ini juga Tiongkok memberikan sumbangan – sumbangan baik itu secara ekonomi sekitar \$40 - \$50 USD maupun ketersediaan pangan Korea Utara sekitar 500.000 ton bahan pangan setiap tahunnya<sup>14</sup>.

Keberpihakan Tiongkok pun terlihat kembali pada forum perundingan enam negara yaitu Amerika Serikat, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang dan Tiongkok (*Six Party Talks*). Perundingan ini merupakan perundingan yang diusung oleh DK-PBB dan IAEA guna terjadinya kesepakatan denuklirisasi di Korea Utara dan konflik yang berada di Semenanjung Korea. *Six Party Talks* ini pun dianggap gagal ketika Korea Utara memutuskan untuk mengundurkan diri dalam forum tersebut pada tahun 2003 dan juga sikap Tiongkok yang dianggap tidak berkontribusi di dalam proses denuklirisasi Korea Utara (Arms Control Association, 2005). Hal ini dicerminkan dari peningkatan jumlah volume ekspor bahan hasil tambang Tiongkok terhadap Korea Utara. Kurang lebih sekitar 80% kebutuhan bahan bakar minyak Korea Utara berasal dari Tiongkok (Jeong, 2012, hal. 30; Blank, 2007, hal. 9). Sedangkan, IAEA mencurigai bahwa bahan bakar

---

<sup>13</sup> Snyder, S. A. (2009). *China's Rise and the Two Koreas: Politics, Economics, Security* Dalam. Lynne Rienner Publishers.

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 240

minyak ini digunakan oleh Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklirnya (Duchâtel dan Schell, 2013, hal. 25).

Keberpihakan Tiongkok terhadap Korea Utara lainnya juga dapat dilihat dari perbedaan respons Tiongkok dalam pengembangan nuklir di negara lainnya seperti India. Garver (2001) menjelaskan bahwa uji coba nuklir India pada bulan Mei 1998 menyebabkan kekhawatiran Tiongkok meningkat dan terjadi ketegangan di antara hubungan kedua negara tersebut (Garver, 2001, hal. 24).<sup>15</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari pidato – pidato yang disampaikan oleh pemerintah Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Tiongkok (FMPRC). Tepat sehari setelah uji coba nuklir pada tanggal 11 Mei 1998, FMPRC memberikan protes keras dengan menyatakan *“China grave concern over the test which were detrimental to peace and stability in South Asian Region”*.<sup>16</sup> Walaupun tidak secara spesifik protes tersebut diberikan oleh India, namun hal ini dapat dilihat dari respons India terhadap protes keras tersebut. Hal ini disampaikan oleh pemerintah India *“We hope that you will show understanding of our concern for India’s security, pose no danger to any country which has no inimical intentions towards India. We value our friendship and co-operation with your country and you personally”* (New York Times, 1998). Yang pada akhirnya ketegangan di antara Tiongkok dan India pun berakhir dengan artian pemerintah Tiongkok memahami bahwa pengembangan nuklir yang dilakukan oleh India tidak di arahkan kepada negaranya seperti yang dikatakan oleh Zhou Gang

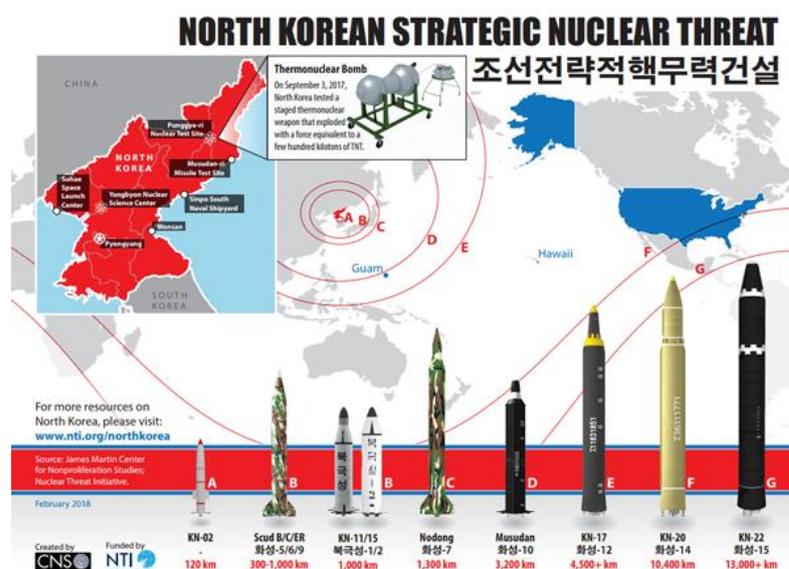
---

<sup>15</sup> Garver, J. W. (2001). *The Restoration of Sino-Indian Comity following India’s Nuclear Tests*. The China Quarterly,

<sup>16</sup> *Ibid.* hal. 3

pidatonya di New Dehli pada 20 Oktober 1998, “*To develop friendly relations between China and any country is not directed against another thir country.... There is no more than a boundary dispute (between China and India, a dispute which) generally speaking ... is a legacy of history when india was ruled by colonialists.*”.<sup>17</sup> Dari peristiwa di atas dapat dikatakan bahwa keberpihakan Tiongkok terhadap Korea Utara dapat dilihat dari perbedaan respons yang dilakukannya terhadap pengembangan nuklir di negara lain seperti India.

Jika di akumulasikan, perkembangan rudal nuklir Korea Utara dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut:



**Gambar 2.2** Perkembangan Rudal Nuklir Korea Utara

Sumber: (NTI, 2018)<sup>18</sup>

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 5

<sup>18</sup> Nuclear Threats Initiative. (2018). Dalam <https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/nuclear/>. Diunduh pada 27 Oktober 2019

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa rudal jenis *KN-02* dapat menjangkau hingga 120km. Lalu, *Scud B/C/ER* dapat menjangkau sekitar 300 – 1.000km, *KN-11/15* dapat menjangkau sekitar 1.000km, *Nodong* dapat menjangkau 1.100km, *Musudan* dapat menjangkau 3.200km, *KN-17* dapat menjangkau kurang lebih 4.500km, *KN-20* dapat menjangkau sekitar 10.400km, dan rudal nuklir Korea Utara terakhir jenis *KN-22* yang diperkirakan dapat menjangkau 13.000km. Dan juga hingga saat ini, Korea Utara telah memiliki 7 pangkalan rudal nuklirnya.<sup>19</sup>

### **2.3. Kebijakan Luar Negeri Tiongkok (Pasca Uji Coba Nuklir Korea Utara Pertama 2006)**

Korea Utara melakukan uji coba rudal nuklirnya pertama kali pada tahun 2006. Menurut laporan dari *Nuclear Threats Initiative* (NTI) menyatakan bahwa pada uji coba tersebut Korea Utara kurang lebih menggunakan 1 kiloton plutonium yang dapat menjangkau kurang lebih sekitar 1.000km dengan peluncuran rudal bawah tanah.<sup>20</sup> Lembaga geologi Amerika Serikat menyatakan uji coba nuklir tersebut telah menyebabkan gempa bumi berkekuatan sekitar 4.2 *skala richter* di sekitar wilayah Pyongyang, Korea Utara (CBS News, 2017). Tindakan Korea Utara ini pun di respons oleh komunitas internasional melalui sidang DK-PBB yang ketika itu memutuskan untuk menetapkan resolusi nomor 1718 mengenai sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Sanksi ekonomi tersebut berupa pemberhentian aktivitas ekspor – impor negara anggota PBB khususnya dalam bidang peralatan

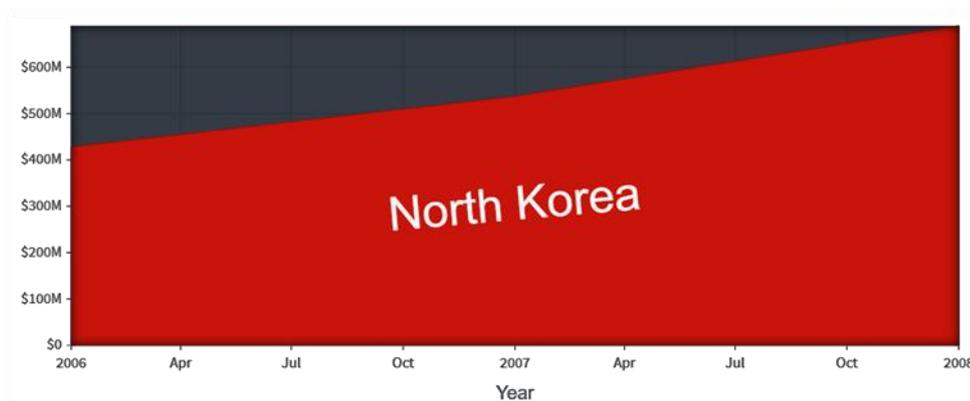
---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

militer, barang hasil tambang, teknologi terbaru yang berkaitan dengan pengembangan nuklir dan juga barang – barang mewah serta anjuran untuk kembali menjalankan perundingan enam negara yang sebelumnya telah dianggap gagal.<sup>21</sup>

Namun setelah resolusi tersebut di tetapkan, Tiongkok kembali menunjukkan keberpihakannya kepada Korea Utara. Menurut laporan DK-PBB, pada pasca penetapan resolusi 1718, Tiongkok menolak adanya pemeriksaan barang – barang ekspor dan impor ditujukan ke Korea Utara.<sup>22</sup> Tidak hanya penolakan terhadap pemeriksaan barang saja, Tiongkok juga tercatat tetap melakukan aktivitas ekspor – impor dengan Korea Utara mengenai barang – barang yang dilarang dalam resolusi tersebut.



**Gambar 2.3** Data Grafik Ekspor Tiongkok ke Korea Utara 2006 – 2008

*Sumber: The Observatory of Economic Complexity (OEC, 2008)*<sup>23</sup>

<sup>21</sup> *Op.cit.*, lih (2)

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *What does China export to North Korea? (2006-2008)*. (2008). Dalam <https://oec.world/en/visualize/stacked/hs92/export/chn/prk/all/2006.2008/>. Diunduh pada 29 Desember 2019



khususnya yang bertentangan dengan resolusi DK-PBB di atas dapat diartikan sebagai keberpihakan Tiongkok terhadap Korea Utara.

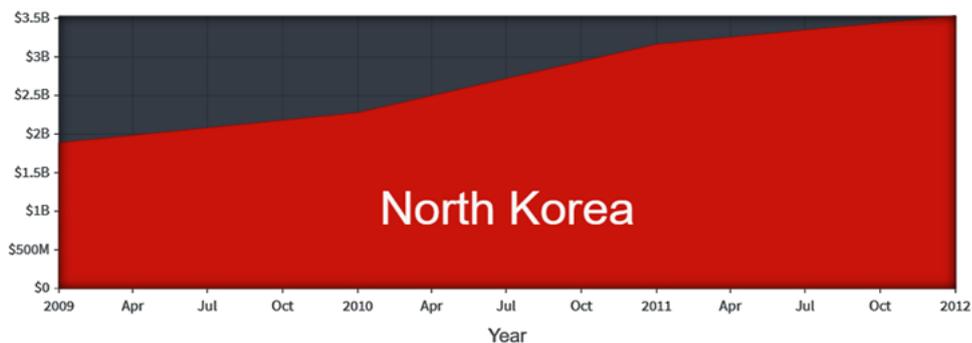
#### **2.4. Kebijakan Luar Negeri Tiongkok (Pasca Uji Coba Nuklir Korea Utara Kedua 2009)**

Perkembangan senjata nuklir Korea Utara pun terus berlanjut. Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal nuklirnya pada tahun 2009. Uji coba nuklir kali ini diperkirakan Korea Utara menggunakan kurang lebih 2 – 4 kiloton plutonium.<sup>27</sup> Dan telah menyebabkan terjadinya gempa bumi di wilayah ibu kota Korea Utara Pyongyang hingga di sekitar perbatasan Tiongkok yang berkekuatan sekitar 5.1 *skala richter* (Gaber dan kawan-kawan, 2017, hal. 279). Dapat di katakan uji coba kali ini lebih kuat di bandingkan uji coba pertama. Tindakan ini pun kembali di respons oleh DK-PBB dengan mengeluarkan resolusi nomor 1887 yang berisikan mengenai pemberlakuan sanksi ekonomi yang sebelumnya telah di tetapkan dalam resolusi nomor 1718 (UNSCR, 2009).

Kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap hal tersebut pun kembali menunjukkan keberpihakannya kepada Korea Utara. Dari laporan data lembaga *Observatory of Economic Complexity* (OEC) memperlihatkan kembali peningkatan aktivitas ekspor Tiongkok ke Korea Utara seperti pada pasca uji coba nuklir pertamanya.

---

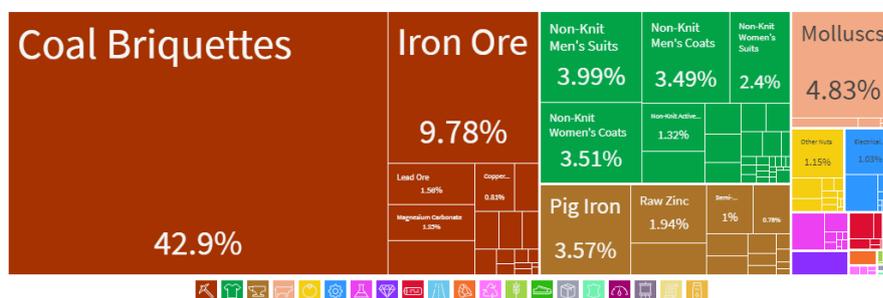
<sup>27</sup> *Loc.cit., lih (38)*



**Gambar 2.5** Data Grafik Ekspor Tiongkok ke Korea Utara 2009 - 2012

*Sumber: The Observatory of Economic Complexity (OEC, 2012)<sup>28</sup>*

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kembali dalam aktivitas ekspor Tiongkok ke Korea Utara pada masa ini. Diperkirakan dari \$2 - \$3.5 miliar USD hingga tahun 2012.<sup>29</sup> Secara spesifik mengenai barang – barang yang di ekspor oleh Tiongkok pada masa ini dapat dilihat di bawah ini.



**Gambar 2.6** Data Ekspor Tiongkok ke Korea Utara 2009 - 2012

*Sumber: The Observatory of Economic Complexity (OEC, 2012)<sup>30</sup>*

Data di atas menunjukkan dalam periode ini juga Tiongkok tetap melakukan aktivitas ekspor barang – barang hasil tambang kepada Korea Utara

<sup>28</sup> *What does North Korea export to China? (2009, 2012).* (2012) Dalam [https://oec.world/en/visualize/tree\\_map/hs92/export/prk/chn/show/2009.2012/](https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/prk/chn/show/2009.2012/). Di unduh pada 30 September 2020

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

seperti pada periode sebelumnya. Hal ini juga merupakan penentangan resolusi mengenai sanksi ekonomi Korea Utara yang telah ditetapkan oleh DK-PBB sebelumnya yakni pada *Annex I* dan *II* (UNSCR, 2006; UNSCR, 2009). Pada masa ini juga dapat diketahui respons Tiongkok yang diberikan dalam menanggapi isu denuklirisasi Korea Utara dapat dikatakan masih menunjukkan keberpihakannya kepada Korea Utara. Keberpihakan Tiongkok kepada Korea Utara dalam isu tersebut juga dapat dilihat dari kebijakan luar negeri Tiongkok yang di nilai memberikan bantuan ekonomi secara masif terhadap Korea Utara yang secara tidak langsung dapat menghambat keberlangsungan dari sanksi ekonomi yang telah ditetapkan oleh DK-PBB tersebut (Lee, 2014, hal. 104-107).<sup>31</sup>

## **2.5. Kebijakan Luar Negeri Tiongkok (Pasca Uji Coba Nuklir Korea Utara Ketiga hingga Kelima 2013 - 2016)**

Pada tahun 2013, media massa *Korean Central News Agency* (KCNA) yang merupakan agensi pusat berita Korea Utara telah mengkonfirmasi bahwa negaranya telah berhasil melakukan uji coba nuklir yang ketiga kalinya. Uji coba kali ini merupakan uji coba nuklir perdana Kim Jong Un sebagai pemimpin Korea Utara pasca pelantikannya pada tahun 2011 (E.Sanger dan Sang-Hun, 2013). Uji coba kali ini juga dapat dikatakan sebagai implementasi dari *Byungjin Policy* yang merupakan doktrin politik yang digagas oleh Kim Jong Un pada masa pelantikannya. Di dalam doktrin tersebut, Kim Jong Un menitik beratkan kepada

---

<sup>31</sup> Lee, H. (2014). *Rising China and the Evolution of China-North Korea Relations*. The Korean Journal of International Studies,.

program pembangunan ekonomi dan militer yang mengembangkan rudal nuklir dan rudal balistiknya (Global Security, 2018). Dalam uji coba nuklir ketiga kali ini, Korea Utara kurang lebih menggunakan 6 – 10 kiloton plutonium dengan metode peluncuran bawah tanah (Erickson, 2017). Lokasi uji coba nuklir kali ini sama seperti uji coba nuklir sebelumnya dilakukan di Punggye-ri (provinsi Hamyong Utara, Korea Utara) yang merupakan pusat uji coba rudal Korea Utara. Pada uji coba kali ini, diperkirakan telah menyebabkan gempa bumi yang berkekuatan 4.9 – 5.0 *skala richter* (BBC, 2013).

Aktivitas pengembangan uji coba nuklir Korea Utara ini pun kembali di respons oleh negara anggota DK-PBB dengan mengeluarkan resolusi nomor 2094 pada tanggal 7 Maret 2013. Resolusi ini merupakan pengadopsian dari resolusi sebelumnya, namun perbedaan resolusi ini terdapat pada penambahan sanksi – sanksi internasional seperti pelarangan warga negara Korea Utara untuk melakukan perjalanan internasional yang tercantum di dalam *Annex I*. Lalu, di dalam *Annex II* terdapat juga pembekuan aset perusahaan impor Korea Utara dan lembaga penelitian yang diduga merupakan lembaga penelitian dalam mengembangkan rudal nuklir tersebut. Di dalam *Annex III*, terdapat pelarangan mengenai bahan – bahan pengembangan senjata nuklir. Lalu yang terakhir di dalam *Annex IV* mengatur mengenai pelarangan ekspor impor barang – barang mewah dan teknologi yang dianggap memiliki keterkaitan dengan perkembangan program nuklir tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Op.cit.*, *lih* (3)

Namun kali ini Tiongkok mengubah sikapnya dengan mendukung implementasi dari resolusi DK-PBB tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Xi Jinping dalam pidato presiden pasca pelantikannya tahun 2013 yang menyatakan “*No one should be allowed to throw a region and even the whole world into chaos for selfish gains*” (BBC, 2013). Secara konkretnya dimulai dari Kementerian Transportasi Tiongkok yang memberikan perintah kepada organisasi – organisasi di bawah naungannya untuk mengimplementasikan resolusi 2094 DK-PBB. Lalu, di dalam laporan pemerintah Tiongkok *US Treasury Department*, pada bulan Mei 2013 melalui *People’s Bank of China, Public Security, Customs Administration, dan Border Guards* telah menutup akun tabungan dan hubungan dengan Foreign Trade Bank milik Korea Utara.<sup>33</sup> Dilanjutkan dengan kebijakan pemerintah Tiongkok melalui Kementerian Perdagangan Tiongkok, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Administrasi Umum Pajak dan Otoritas Energi Atom mempublikasikan 236 lembar dokumen yang berisikan daftar barang – barang yang dilarang dari aktivitas ekspor Korea Utara. Dalam artian Tiongkok mengembargo aktivitas ekspor Korea Utara terhadap negaranya.<sup>34</sup>

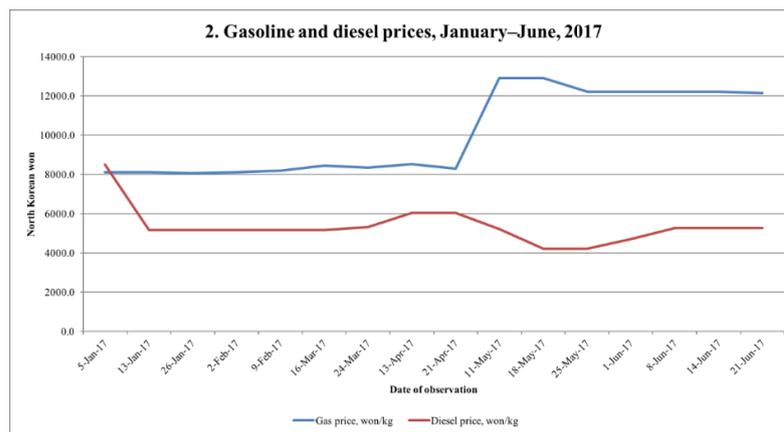
Lalu, pasca uji coba nuklir Korea Utara ke empat (2016) dan ke lima (2017), Tiongkok tetap mengimplementasikan resolusi DK-PBB yang telah ditetapkan dengan nomor 2270 (2016), 2321 (2016), 2321 (2016) dan 2375 (2017) dengan mengembargo minyak dan barang – barang hasil mineral seperti batu bara

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Op.cit., lih (4)*

dan gas alam (BBC, 2016; Silberstein, 2019; Jiang, 2019, hal. 11). Secara spesifik pada tahun 2017 ketika Tiongkok melakukan embargo bahan bakar minyak terhadap Korea Utara perekonomian negara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



**Gambar 2.7** Grafik Peningkatan Harga Minyak di Korea Utara

*Sumber: (Silberstein, 2019)<sup>35</sup>*

Grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan harga atas penurunan persediaan bahan bakar minyak di Korea Utara pada bulan Januari hingga Juni 2017. Dalam artian embargo yang dilakukan oleh Tiongkok atas perubahan kebijakannya terhadap Korea Utara memberikan dampak yang signifikan bagi Korea Utara<sup>36</sup>.

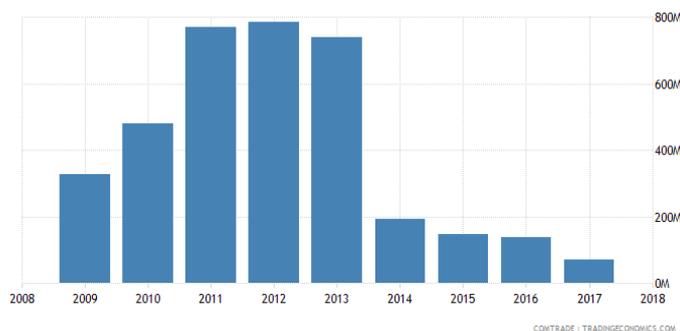
Tidak hanya itu, Tiongkok pun melakukan implementasi penghentian aktivitas ekspor mengenai bahan hasil tambang terhadap Korea Utara seperti yang

---

<sup>35</sup> Silberstein, B. K. (2019, Februari 1). *China's Sanctions Enforcement and Fuel Prices in North Korea: What the Data Tells Us*. Dalam <https://www.38north.org/2019/02/bkatzeffsilberstein020119/>. Diunduh pada 27 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB.

<sup>36</sup> *Ibid.*

dituliskan dalam *Annex II* dan *III* resolusi DK-PBB nomor 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) dan 2375 (2017). Hal ini dapat dilihat dari grafik aktivitas ekspor Tiongkok ke Korea Utara di bawah ini.



**Gambar 2.8** Grafik Aktivitas Ekspor Tiongkok ke Korea Utara

*Sumber: (Trading Economics, 2008 - 2018)*<sup>37</sup>

Grafik di atas menunjukkan terdapat penurunan aktivitas ekspor Tiongkok ke Korea Utara dimulai dari tahun 2013 dari sekitar \$700 juta USD hingga \$100 juta USD dalam kurun waktu 4 tahun.<sup>38</sup> Dalam artian dapat diketahui bahwa Tiongkok mengalami perubahan kebijakan luar negeri dalam menanggapi isu denuklirisasi Korea Utara dari yang tidak berkontribusi secara aktif menjadi lebih aktif.

## 2.6. Kesimpulan

Dari bab ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan teknologi nuklir Korea Utara ini di latar belakang oleh doktrin *Juche* yang digagas oleh Kim Il Sung yang dimana doktrin tersebut mengedepankan kemandiriannya dalam tiga sektor

---

<sup>37</sup> *China exports to North Korea*. (2018). Dalam <https://tradingeconomics.com/china/exports/north-korea> . Diunduh pada 3 Maret 2019

<sup>38</sup> *Ibid.*

utama yaitu ekonomi, politik dan militer. Secara ekonomi dan politik, pembangunan teknologi nuklir ini digunakan sebagai daya tarik atau *bargaining position* Korea Utara di dalam komunitas internasional. Secara militer, pembangunan teknologi nuklir ini digunakan untuk pertahanan diri negaranya dari serangan ataupun ancaman luar mengingat pada masa awal pembangunan tersebut kondisi politik internasional sedang di sibukkan dengan perang dingin di antara Tiongkok sebagai sekutunya dan Amerika Serikat beserta sekutunya sebagai musuhnya.

Respons Tiongkok sebelum uji coba nuklir ketiga (2013), berkesan seperti memiliki keberpihakan terhadap Korea Utara. Hal ini dapat dilihat dari tindakan – tindakannya seperti menolak usulan IAEA untuk mengawasi perkembangan nuklir Korea Utara, menolak adanya pemeriksaan barang ekspor ke Korea Utara, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan penetapan sanksi DK-PBB dari tahun 2006 hingga 2013 dengan tetap melakukan ekspor barang – barang hasil tambang yang di duga akan digunakan untuk pengembangan teknologi nuklir Korea Utara yang dinilai menghambat berjalan sanksi ekonomi DK-PBB. Dan juga perbedaan respons Tiongkok ketika pengembangan nuklir India dilakukan. Dalam hal ini Tiongkok memprotes tindakan pemerintah India dalam uji coba nuklir nya yang tidak dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap Korea Utara. Hal tersebut dapat dinilai pemerintah Tiongkok lebih berpihak kepada Korea Utara.

Namun, kebijakan Tiongkok tersebut berubah dimulai dari tahun 2013 pasca uji coba nuklir ketiga Korea Utara seraya pelantikan kepemimpinan Tiongkok yang baru Xi Jinping. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan – kebijakan

pemerintah Tiongkok yang mengimplementasikan resolusi DK-PBB seperti menghentikan aktivitas ekspor berlebihan mengenai barang – barang hasil tambang yang diduga akan digunakan sebagai pengembangan nuklir oleh pemerintah Korea Utara.